Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 14770-14776

Soft Power Indonesia Pasca Asian Games 2018: Relevansi terhadap Perubahan Karakteristik Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Pemerintahan Joko Widodo di Periode Kedua (2019-2024)

Yarham Harid[1], Stivani Ismawira Sinambela[2]
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan
Universitas Potensi Utama Medan
Email : yarhamharid10@gmail.com, stivani@potensi-utama.ac.id

Published : February, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Asian Games 2018 dalam transformasi *soft power* dan pembentukan agenda baru politik luar negeri Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Secara konseptual, pergeseran dari *hard power* menuju *soft power* mendorong negara-negara berkembang memanfaatkan *mega-event* sebagai instrumen *nation branding* dan legitimasi global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka (*library research*), melalui analisis dokumen resmi pemerintah, pidato presiden, serta literatur akademik periode 2014–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2014–2018, politik luar negeri Indonesia lebih berorientasi pada pragmatisme ekonomi dan penegasan kedaulatan maritim melalui *Global Maritime Fulcrum*, dengan *soft power* yang masih bersifat implisit dan normatif. Pasca-Asian Games 2018, terjadi pergeseran menuju diplomasi yang lebih simbolik, proaktif, dan terintegrasi, yang tercermin dalam penguatan *nation branding*, diplomasi digital, serta kepemimpinan Indonesia dalam forum global seperti G20 dan kerja sama *Global South*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Asian Games 2018 merupakan titik balik strategis (*critical juncture*) yang mempercepat institusionalisasi *soft power* Indonesia dan memperkuat posisinya sebagai *middle power* dalam sistem internasional.
Kata Kunci: *Soft Power*, Politik Luar Negeri Indonesia, Asian Games 2018, *Middle Power*, *Nation Branding*

ABSTRACT

This study analyzes the role of the 2018 Asian Games in the transformation of soft power and the formation of a new foreign policy agenda for Indonesia during the administration of President Joko Widodo. Conceptually, the shift from hard power to soft power has encouraged developing countries to utilize mega-events as instruments of nation branding and global legitimacy. This study uses a descriptive qualitative approach with library research techniques, through analysis of official government documents, presidential speeches, and academic literature from the period 2014–2024. The results show that in the 2014–2018 period, Indonesia's foreign policy was more oriented towards economic pragmatism and the assertion of maritime sovereignty through the Global Maritime Fulcrum, with soft power still being implicit and normative. After the 2018 Asian Games, there was a shift towards more symbolic, proactive, and integrated diplomacy, reflected in the strengthening of nation branding, digital diplomacy, and Indonesia's leadership in global forums such as the G20 and Global South cooperation. This study concludes that the 2018 Asian Games were a critical juncture that accelerated the institutionalization of Indonesia's soft power and strengthened its position as a middle power in the international system.
Keywords: Soft Power, Indonesian Foreign Policy, 2018 Asian Games, Middle Power, Nation Branding

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, dinamika politik internasional menunjukkan perubahan yang cukup mendasar. Jika sebelumnya pengaruh negara lebih banyak ditentukan oleh kekuatan militer dan tekanan ekonomi (*hard power),* kini pendekatan yang menekankan daya tarik dan legitimasi semakin menonjol. Pergeseran ini menandai meningkatnya peran *soft power* sebagai sarana membangun pengaruh tanpa harus mengandalkan paksaan. *Soft power* merupakan kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui daya tarik (*attraction),* bukan melalui tekanan atau paksaan (*coercion)* (Nye Joseph, 2004). Dengan kata lain, kekuatan ini bertumpu pada citra, nilai, dan legitimasi yang membuat negara lain bersedia mengikuti atau mendukung tanpa merasa dipaksa.

Dalam lanskap global yang semakin multipolar dan kompetitif, negara-negara berkembang memanfaatkan berbagai ajang internasional berskala besar seperti Olimpiade dan Asian Games sebagai medium diplomasi yang bersifat simbolik. Melalui penyelenggaraan *mega-event* tersebut, negara tidak hanya menampilkan kapasitas organisasional dan stabilitas domestik, tetapi juga membangun citra positif (*nation branding)* serta berupaya mereposisi diri dalam struktur dan hierarki politik internasional (Stromseth, 2021; Trotier, 2021). Ajang olahraga berskala besar tidak hanya dapat dipahami sebagai kompetisi antar-atlet, tetapi juga sebagai ruang di mana makna politik dibentuk dan identitas nasional ditampilkan ke hadapan publik internasional. Berbagai kajian menegaskan bahwa negara penyelenggara memanfaatkan momentum tersebut untuk memperlihatkan stabilitas dalam negeri, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta tingkat kemajuan dan modernitas ekonominya. Dengan demikian, *mega-event* olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun persepsi positif di mata dunia. Di kawasan Asia, kecenderungan ini tampak pada negara-negara berkategori *middle power* seperti Korea Selatan, India, dan Indonesia. Mereka semakin intens mengandalkan diplomasi yang menekankan citra, jejaring, dan konektivitas sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh di tingkat regional. Strategi tersebut dipilih sebagai alternatif yang lebih persuasif dan konstruktif dibandingkan pendekatan berbasis konfrontasi militer secara langsung (Pant & Saha, 2024). Dalam konteks tersebut, pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang menjadi titik krusial bagi Indonesia untuk mengoptimalkan proyeksi *soft power* sekaligus memperluas eksposur dan pengaruhnya di tingkat global. Ajang ini tidak hanya menghadirkan dimensi olahraga, tetapi juga membuka ruang bagi Indonesia untuk menampilkan kapasitas nasionalnya kepada komunitas internasional. Asian Games 2018 berperan sebagai sarana untuk memperkuat konektivitas dan legitimasi Indonesia di kawasan Asia (Trotier, 2021). Pada saat yang sama, perhelatan tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap pandangan yang menilai bahwa kebijakan luar negeri Presiden Jokowi pada periode awal pemerintahannya cenderung berorientasi ke dalam (*inward-looking*).

Sejak dilantik pada 2014, Presiden Joko Widodo mengemukakan konsep Global Maritime Fulcrum (GMF) sebagai landasan utama arah kebijakan luar negeri Indonesia. Gagasan ini dirancang sebagai kerangka strategis yang menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. GMF bertumpu pada lima pilar, yakni pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, infrastruktur maritim, diplomasi maritim, serta pertahanan maritim (Shekhar, 2018). Dalam implementasinya, kebijakan tersebut kerap dikaitkan dengan penegasan kedaulatan nasional, termasuk langkah tegas penenggelaman kapal asing serta penguatan posisi Indonesia di perairan Natuna.

Agenda maritim Presiden Jokowi tidak selalu berjalan konsisten, melainkan mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh konfigurasi aktor domestik dan birokrasi kebijakan luar negeri (Agastia, 2021). Di sisi lain, indonesia pada periode ini lebih mendekati strategi *hedging*, yaitu menjaga jarak dari keterikatan eksklusif dengan kekuatan besar sembari mempertahankan ruang otonomi strategis (Caroline, 2021). Dalam relasi dengan Tiongkok, strategi tersebut dipadukan dengan diplomasi ekonomi yang pragmatis, terutama melalui kerja sama investasi dan pembangunan infrastruktur (Laoli & Sinambela, 2023). Meski demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa pada fase awal pemerintahan Jokowi, diplomasi Indonesia relatif kurang menonjol dalam aspek normatif dan kepemimpinan simbolik di tingkat global dibandingkan periode sebelumnya (Pratiwi, 2021). Penekanan yang kuat pada pembangunan dalam negeri, percepatan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi turut membentuk persepsi bahwa orientasi kebijakan luar negeri Indonesia pada 2014–2018 cenderung lebih berfokus ke dalam (Trotier, 2021). Dengan demikian, sebelum 2018, karakteristik politik luar negeri Indonesia dapat diringkas dalam tiga ciri utama: (1). Pragmatisme ekonomi dan infrastruktur sebagai prioritas utama, (2). Penegasan kedaulatan maritim dan keamanan teritorial, (3). Keterlibatan multilateral yang selektif dan berbasis kepentingan nasional konkret.

Penyelenggaraan Asian Games 2018 membawa warna baru dalam praktik diplomasi Indonesia. Upacara pembukaannya tidak sekadar menjadi seremoni olahraga, melainkan panggung yang menampilkan pesan tentang kebhinekaan, kemajuan kota-kota Indonesia, serta figur kepemimpinan nasional yang tegas dan percaya diri. Simbolisme yang dibangun dalam video pembukaan Asian Games 2018 membentuk narasi politik yang memosisikan Jokowi sebagai pemimpin nasionalis-progresif, sosok yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas secara bersamaan (Ritonga et al., 2019). Bahkan salah satu penelitian menyebutnya sebagai "*master of politic of symbols*," untuk menegaskan betapa sentralnya penggunaan simbol dalam memperkuat legitimasi, baik di tingkat domestik maupun internasional (Arbay & Pasha, 2024). Dari sisi eksternal, keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah turut memperkuat persepsi

mengenai kapasitas tata kelola nasional serta memperluas jaringan diplomatik di kawasan Asia. Ajang ini mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu simpul konektivitas regional, sekaligus meredam anggapan bahwa pada awal pemerintahannya Indonesia cenderung berorientasi ke dalam (*inward looking)* (Trotier, 2021). Selain itu, Asian Games 2018 juga berkontribusi pada tumbuhnya rasa percaya diri diplomatik Indonesia dalam forum-forum global berikutnya, termasuk saat memegang Presidensi G20 pada 2022. Praktik diplomasi digital Indonesia selama G20 menunjukkan pola *soft power* yang lebih terarah dan terintegrasi dibandingkan periode sebelumnya (Agung & Intentilia, 2022). Temuan ini mengindikasikan adanya kesinambungan antara pengalaman menjadi tuan rumah Asian Games dan penguatan kapasitas diplomasi publik Indonesia di tingkat global.

Walaupun berbagai kajian telah mengulas arah politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi, masih terdapat sejumlah celah analitis yang patut dicermati. Pertama, penelitian yang menyoroti Global Maritime Fulcrum (GMF) dan isu keamanan maritim (Caroline, 2021; Shekhar, 2018) umumnya berfokus pada dimensi strategis dan pertahanan, namun belum secara komprehensif menghubungkannya dengan implikasi diplomatik dari penyelenggaraan *mega-event* seperti Asian Games. Kedua, studi tentang diplomasi digital dan praktik *soft power* Indonesia (Agung & Intentilia, 2022) belum secara eksplisit menempatkan Asian Games sebagai momentum awal dalam proses konsolidasi *nation branding* Indonesia yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Ketiga, kajian mengenai dinamika kebijakan Indonesia terhadap Afrika dan kawasan *Global South* (Dorigné-Thomson, 2023) juga belum menghadirkan perbandingan yang jelas antara periode sebelum dan sesudah 2018 dalam kerangka kesinambungan kepemimpinan Jokowi. Berdasarkan hal tersebut, masih terbuka ruang analisis untuk menjawab pertanyaan mendasar: apakah Asian Games 2018 hanya berfungsi sebagai peristiwa simbolik semata, atau justru menjadi katalis yang mendorong pembentukan agenda baru dalam politik luar negeri Indonesia pada periode kedua pemerintahan Jokowi (2019–2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: mengkaji secara komparatif karakter politik luar negeri Indonesia sebelum dan setelah penyelenggaraan Asian Games 2018 pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, menelaah bentuk perubahan sekaligus kesinambungan dalam pemanfaatan instrumen *soft power* Indonesia, dan mengevaluasi sejauh mana Asian Games 2018 memiliki arti strategis dalam mendorong terbentuknya agenda politik luar negeri Indonesia yang semakin proaktif, pragmatis, serta bertumpu pada legitimasi simbolik di tingkat global. Melalui pendekatan komparatif-temporal, artikel ini berpendapat bahwa Asian Games 2018 dapat dipahami sebagai titik balik strategis dalam praktik *soft power* Indonesia. Peristiwa tersebut dinilai mempercepat pergeseran orientasi politik luar negeri dari penekanan maritim yang cenderung defensif menuju pola diplomasi yang lebih simbolik, terbuka, dan proaktif dengan klaim kepemimpinan global yang lebih jelas.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan (library research). Pilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya memahami serta menjelaskan secara sistematis perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia sebelum dan sesudah Asian Games 2018 dalam konteks kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada pemaknaan dan interpretasi fenomena berdasarkan data tekstual, bukan pada pengukuran statistik atau pengujian hipotesis kuantitatif. Pendekatan ini relevan dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam analisis kebijakan luar negeri yang banyak bertumpu pada dokumen resmi, pidato politik, dan literatur akademik. Teknik studi pustaka dipilih karena objek kajian berupa kebijakan, wacana, serta praktik diplomasi yang terdokumentasi secara tertulis. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat menghimpun dan menelaah berbagai sumber sekunder secara sistematis guna menemukan pola perubahan maupun kesinambungan kebijakan. Selain itu, metode ini efektif untuk penelitian komparatif-temporal karena memungkinkan penelusuran dinamika kebijakan pada dua rentang waktu berbeda tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, termasuk pidato Presiden Joko Widodo periode 2014–2024, artikel terkait Global Maritime Fulcrum, serta publikasi terkait Asian Games 2018 dan Presidensi G20 2022. Selain itu, data diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, buku akademik, disertasi, serta laporan kebijakan yang relevan dengan isu *soft power* dan politik luar negeri Indonesia. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan tingkat

relevansi, kredibilitas ilmiah (*peer-reviewed*), serta kemudahan pelacakan referensi melalui DOI atau repositori resmi guna menjaga validitas akademik. Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan dan perumusan pertanyaan riset yang berfokus pada perbandingan orientasi politik luar negeri Indonesia dalam periode 2014–2018 dan 2019–2024. Temuan yang diperoleh kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka teori *soft power* dan *middle power* diplomacy untuk menjelaskan signifikansi Asian Games 2018 dalam pembentukan agenda politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi periode kedua. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka ini dinilai memadai dan sesuai untuk menjelaskan transformasi *soft power* Indonesia secara komprehensif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian terhadap literatur dan dokumen kebijakan pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2018), terlihat bahwa arah politik luar negeri Indonesia saat itu sangat dipengaruhi oleh pragmatisme ekonomi serta penegasan kedaulatan maritim. Doktrin Global Maritime Fulcrum (GMF) dijadikan fondasi utama yang memposisikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan fokus pada keamanan laut, pembangunan infrastruktur kelautan, serta penguatan diplomasi maritim (Agastia, 2021; Shekhar, 2018). Dalam pelaksanaannya, langkah tegas seperti penenggelaman kapal ilegal dan penguatan sikap Indonesia di Laut Natuna memperlihatkan kecenderungan penggunaan elemen hard power yang bersifat simbolik, alih-alih penguatan daya tarik normatif di tingkat internasional (Caroline, 2021). Walaupun diplomasi tercantum sebagai salah satu pilar GMF, implementasinya lebih diarahkan pada perlindungan kepentingan nasional dan stabilitas domestik ketimbang upaya membangun citra global yang lebih luas. Sejumlah studi juga mencatat bahwa pada fase awal kepemimpinan Jokowi, orientasi kebijakan luar negeri tampak lebih berfokus ke dalam, dengan prioritas utama pada pembangunan ekonomi nasional dan percepatan infrastruktur (Trotier, 2021). Dalam hubungan dengan Tiongkok, misalnya, pendekatan yang ditempuh lebih mencerminkan strategi hedging yang pragmatis daripada berbasis norma atau gagasan ideologis (Karim et al., 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebelum 2018, pemanfaatan *soft power* Indonesia belum terintegrasi secara menyeluruh dalam agenda kebijakan luar negeri, melainkan berjalan secara parsial melalui diplomasi ekonomi dan peran di ASEAN. Meski demikian, bukan berarti dimensi *soft power* sama sekali tidak hadir. Indonesia tetap mempertahankan citra sebagai negara demokrasi Muslim moderat serta aktor kunci di ASEAN (Acharya, 2024). Namun, identitas tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan dalam bentuk strategi *nation branding* global yang terencana dan terkoordinasi. Oleh karena itu, sebelum Asian Games 2018, *soft power* Indonesia lebih bersifat laten dan normatif, belum berkembang menjadi instrumen yang strategis dan terlembagakan secara sistematis.

Asian Games 2018 dapat dipandang sebagai momen krusial dalam proses penataan kembali strategi *soft power* Indonesia. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah tidak hanya berdampak pada aspek olahraga, tetapi juga memperkuat persepsi mengenai kapasitas tata kelola nasional di mata publik kawasan maupun internasional (Trotier, 2021). Melalui narasi pembukaan yang menonjolkan keberagaman budaya, kemajuan urban, serta figur kepemimpinan nasional, terbentuk representasi simbolik yang menegaskan identitas Indonesia sebagai negara yang inklusif dan progresif (Ritonga et al., 2019). Penggunaan simbolisme politik dalam Asian Games turut memperkokoh legitimasi di tingkat domestik sekaligus membangun citra kepemimpinan Indonesia di ranah global (Arbay & Pasha, 2024). Dalam kerangka *soft power*, ajang ini berfungsi sebagai instrumen *nation branding* yang memperbesar daya tarik Indonesia, khususnya di kawasan Asia (Harid & Sinambela, 2026). Pandangan ini selaras dengan argumen Joseph Nye (2004) yang menekankan bahwa budaya dan nilai-nilai suatu negara dapat menjadi sumber pengaruh dalam politik internasional. Secara empiris, periode setelah 2018 menunjukkan peningkatan yang lebih nyata dalam praktik diplomasi publik dan diplomasi digital Indonesia, terutama saat memegang Presidensi G20 pada 2022. Strategi diplomasi digital selama G20 dijalankan secara lebih terkoordinasi dan sistematis dibandingkan fase sebelumnya, yang menandakan adanya konsolidasi *soft power* yang lebih matang (Agung & Intentilia, 2022). Dalam konteks ini, Asian Games dapat dipahami sebagai *catalytic event* yang mempercepat transformasi pendekatan diplomasi Indonesia menuju pola yang lebih terarah dan strategis.

Pasca 2018, arah diplomasi Indonesia menunjukkan peningkatan intensitas di sejumlah ranah strategis. Pertama, terdapat upaya memperluas jejaring dengan negara-negara Afrika melalui penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum serta penguatan kerja sama Selatan–Selatan (Dorigné-Thomson, 2023). Kedua, Indonesia semakin menegaskan diplomasi Islam moderat dan komitmen pada perdamaian global sebagai bagian dari identitas normatifnya (Seeth, 2023). Ketiga, peran Indonesia dalam isu-isu Timur Tengah, khususnya terkait Palestina dan manajemen konflik kawasan, juga tampak semakin aktif.

Kebijakan Indonesia terhadap Afrika mencerminkan upaya untuk merekonstruksi kekuatan nasional (*reinventing Indonesian power*) melalui perpaduan diplomasi ekonomi dan *soft power* yang bersifat simbolik (Dorigné-Thomson, 2023). Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, Indonesia berusaha memperluas jangkauan globalnya, tidak lagi terbatas pada lingkup ASEAN dan Indo-Pasifik. Kepemimpinan Indonesia dalam forum G20 juga turut memperlihatkan kapasitasnya dalam menjalankan fungsi mediasi sekaligus menentukan agenda (*agenda-setting*), terutama dalam isu pemulihan ekonomi global dan transisi energi (Maksum, 2024). Jika pada periode awal perhatian lebih terpusat pada isu keamanan maritim, maka pada fase kedua terlihat kombinasi yang lebih seimbang antara diplomasi ekonomi, simbolik, dan normatif. Di sisi lain, dinamika domestik menjelang akhir masa jabatan Jokowi juga memperlihatkan penekanan pada pembangunan proyek-proyek warisan (*legacy projects*), termasuk rencana pemindahan ibu kota negara (Hudalah, 2023). Inisiatif-inisiatif tersebut tidak hanya berdimensi pembangunan nasional, tetapi juga memiliki makna simbolik di tingkat internasional, yang memperkuat narasi Indonesia sebagai *rising middle power* dengan kapasitas transformasi yang signifikan. Dengan demikian, pasca-Asian Games 2018, politik luar negeri Indonesia memperlihatkan ciri:

1. Ekspansi diplomasi simbolik dan *nation branding* global
2. Penguatan diplomasi ekonomi multilateral (G20, Afrika, *Global South*).
3. Integrasi *soft power* dalam strategi *middle power* Indonesia.

Dengan kata lain, pasca-Asian Games 2018, *soft power* tidak lagi bersifat periferal, melainkan menjadi bagian integral dari agenda politik luar negeri.

Perbandingan antara dua fase pemerintahan tersebut memperlihatkan adanya perubahan orientasi yang cukup jelas: dari diplomasi yang menitikberatkan pada isu kedaulatan dan prioritas ekonomi domestik, menuju diplomasi yang semakin bertumpu pada legitimasi simbolik dan klaim kepemimpinan di tingkat global. Pada periode 2014–2018, dimensi *soft power* cenderung hadir secara implisit dan lebih bersifat normatif. Sebaliknya, dalam rentang 2019–2024, pemanfaatan *soft power* tampak lebih terbuka, terencana, dan dijadikan bagian dari strategi yang lebih sadar arah. Temuan ini memperluas argumen Agastia (2021) mengenai sifat fluktuatif GMF, dengan menunjukkan bahwa dinamika tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor struktural dan domestik, tetapi juga momentum simbolik seperti Asian Games. Sejumlah studi sebelumnya memang membahas dinamika politik luar negeri Indonesia, namun belum secara tegas menempatkan Asian Games sebagai titik balik (*turning point*) dalam evolusinya (Caroline, 2021; Trotier, 2021). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *mega-event* tersebut berfungsi sebagai katalis yang mempercepat proses institusionalisasi *soft power*, yang kemudian mencapai artikulasi paling nyata pada Presidensi G20 tahun 2022. Dari sisi teoretis, temuan ini memperkaya literatur mengenai *middle power diplomacy* dengan menunjukkan bahwa negara berkembang dapat memanfaatkan *mega-event* sebagai sarana transisi strategis—dari pendekatan yang relatif defensif menuju diplomasi yang lebih proaktif. Selain itu, hasil ini juga menegaskan kembali relevansi teori *soft power* Joseph Nye ketika diaplikasikan pada konteks negara-negara *Global South*.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan *soft power* tidak selalu berlangsung secara bertahap dan linear, melainkan dapat mengalami percepatan ketika muncul momentum krusial (critical junctures) seperti penyelenggaraan *mega-event* internasional. Perspektif ini menambah kedalaman dalam studi perubahan kebijakan luar negeri dengan memasukkan dimensi simbolik sebagai faktor yang mampu mempercepat transformasi. Di samping itu, riset ini juga memperluas pembahasan mengenai posisi Indonesia sebagai *middle power* dengan menyoroti pentingnya *nation branding* dan diplomasi simbolik dalam praktik kebijakan eksternalnya. Dari sisi praktis, temuan ini menegaskan urgensi konsistensi dalam merancang dan menjalankan strategi *nation branding* sebagai bagian integral dari politik luar negeri Indonesia. Pengalaman Asian Games dan Presidensi G20 dapat dijadikan rujukan untuk merancang pola

diplomasi di masa mendatang, termasuk dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara maupun partisipasi dalam berbagai forum multilateral. Upaya mengintegrasikan *soft power* dengan diplomasi ekonomi dan keamanan berpotensi memperkuat daya tawar Indonesia di tengah sistem internasional yang kian kompetitif. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Asian Games 2018 tidak dapat dipahami semata sebagai ajang olahraga. Peristiwa tersebut merupakan momentum strategis yang turut membentuk agenda politik luar negeri Indonesia menjadi lebih proaktif, sarat makna simbolik, serta berorientasi pada klaim kepemimpinan global pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Asian Games 2018 merupakan momen penting yang memberi kontribusi nyata terhadap perubahan arah politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kurun 2014–2018, orientasi kebijakan luar negeri lebih difokuskan pada pragmatisme ekonomi serta penegasan kedaulatan maritim melalui kerangka Global Maritime Fulcrum (GMF). Pada tahap ini, unsur *soft power* memang hadir, namun sifatnya masih implisit dan normatif, serta belum terkelola secara terintegrasi dalam strategi kebijakan luar negeri secara menyeluruh. Memasuki periode setelah Asian Games 2018 (2019–2024), terlihat adanya pergeseran menuju pola diplomasi yang lebih simbolik, aktif, dan berlandaskan legitimasi global. Ajang tersebut berperan sebagai katalis yang mendorong proses institusionalisasi *soft power* Indonesia, antara lain melalui penguatan *nation branding*, diplomasi publik, dan diplomasi digital.

Perkembangan ini mencapai bentuk yang lebih matang saat Indonesia memegang Presidensi G20 tahun 2022, serta ketika diplomasi diperluas ke kawasan Afrika dan *Global South*. Dalam fase ini, *soft power* tidak lagi berada di pinggiran kebijakan, melainkan menjadi bagian sentral dari strategi Indonesia sebagai *middle power*. Dengan demikian, Asian Games 2018 dapat dipahami sebagai titik balik strategis yang mempercepat transformasi politik luar negeri Indonesia dari pendekatan yang relatif defensif dan berfokus ke dalam, menuju diplomasi yang lebih terbuka, sarat makna simbolik, dan berorientasi pada kepemimpinan global. Temuan ini menegaskan bahwa *mega-event* internasional dapat menjadi *critical juncture* dalam dinamika perubahan kebijakan luar negeri, khususnya bagi negara berkembang yang berupaya memperkuat posisi dan daya saingnya dalam tatanan internasional yang semakin kompetitif.

REFERENSI

Acharya, A. (2024). Dynamics of Sports Diplomacy in Promoting International Relations and Peace-Building. *Political Science Journal*, *2*(1), 1–11. https://doi.org/10.3126/psj.v2i1.75108

Agastia, I. G. B. D. (2021). Joko Widodo's Fleeting Maritime Ambitions: An Actor-Specific Analysis of Indonesia's Global Maritime Fulcrum. *Journal of Asian Security and International Affairs*, *8*(3), 304–323. https://doi.org/10.1177/23477970211039306

Agung, A., & Intentilia, M. (2022). Indonesia's G20 Presidency 2022: Connecting Soft Power and Digital Diplomacy Practice on Instagram. *Indonesian Perspective*, *7*(2), 145–163. https://doi.org/10.14710/ip.v7i2.50776

Arbay, E. A., & Pasha, J. A. (2024). Jokowi: New Indonesia's Master of Politic of Symbols. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.5065374

Caroline, E. (2021). Indonesia's Global Maritime Fulcrum: From Hedging to Underbalancing. *Journal of Asian Security and International Affairs*, *8*(3), 413–432. https://doi.org/10.1177/23477970211041661

Dorigné-Thomson, C. (2023). *Indonesian Foreign Policy's Contemporary Evolution*. 67–127. https://doi.org/10.1007/978-981-99-6651-6_2

Harid, Y., & Sinambela, S. I. (2026). Diplomasi Olahraga dalam Asian Games 2018 sebagai Instrumen Nation Branding dan Penguatan Middle Power Indonesia di Asia. *Anterior Jurnal*, *25*(1), 1–12. https://doi.org/10.33084/ANTERIOR.V25I1.11103

Hudalah, D. (2023). Building a capital city, carving out a megaproject legacy? *Habitat International*, *141*, 102933. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102933

Karim, M. F., Gobel, A., & Wicaksana, I. G. W. (2023). Bureaucratic Politics and Informality in Foreign Policy-making: The Case of Indonesia-China Relations. *International Spectator*, *58*(3), 131–151. https://doi.org/10.1080/03932729.2023.2235140

Laoli, S., & Sinambela, S. I. (2023). Kerjasama Indonesia dengan Tiongkok di Bidang Infrastruktur Studi Kasus : PLTA Batang Toru. *Journal of Global Perspective*, *1*(2), 50–60. https://kti.potensi-utama.org/index.php/JoGP/article/view/182

Maksum, A. S. Z. A. (2024). *Navigating Global Challenges and National Interest: The Discourse of Indonesian President Joko Widodo at the 2022 G20 Summit*. https://www.researchgate.net/publication/387413298_Navigating_Global_Challenges_and_National_Interest_The_Discourse_of_Indonesian_President_Joko_Widodo_at_the_2022_G20_Summit

Nye Joseph. (2004). The means to success in world politics. *New York: Public Affairs*, 193.

Pant, H. V, & Saha, P. (2024). *India, South Korea and the ASEAN*. Routledge India. https://doi.org/10.4324/9781003507550

Pratiwi, F. I. (2021). *Rethinking Indonesia's foreign policy : principles in evolving contemporary dynamics*. Airlangga University Press. https://scholar.unair.ac.id/en/publications/rethinking-indonesias-foreign-policy-principles-in-evolving-conte/

Ritonga, R., Nugroho, E., & Handoko, D. (2019). Struggle of Meaning and the Jokowi Myth in the 2018 Asian Games Opening Video. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, *35*(1), 137–155. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3501-10

Seeth, T. (2023). *Indonesia's Islamic Peace Diplomacy: Crafting a Role Model for Moderate Islam*. https://doi.org/10.57671/gfas-23022

Shekhar, V. (2018). *Indonesia's Foreign Policy and Grand Strategy in the 21st Century*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315560977

Stromseth, J. (2021). *Rivalry and Response: Assessing Great Power Dynamics in Southeast Asia*. https://doi.org/10.5040/9780815752325

Trotier, F. (2021). Indonesia's Position in Asia: Increasing Soft Power and Connectivity through the 2018 Asian Games. *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, *9*(1), 81–97. https://doi.org/10.1017/trn.2020.12